



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 68/1/2024  
TENTANG

TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, perlu ditetapkan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara

Republik.....

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Target capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bintan Tahun 2024, dengan target capaian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Target capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi prioritas yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah Pengampu melalui pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Pemenuhan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menjadi salah satu indikator penilaian kinerja Bupati terhadap Kepala Perangkat Daerah Pengampu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bintan dan sumber lainnya yang sah.

KELIMA ..... 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal, 12 JANUARI 2024

✓ BUPATI BINTAN,



✓ ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
 NOMOR 68 / 2024  
 TENTANG  
 TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN
			JUMLAH	SATUAN	
<b>A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN</b>					
<b>Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD</b>					
1	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	24	Lembaga	100%
		Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	10	orang	100%
		Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,36	Persentase	100%
		Kecukupan formasi guru ASN	10	Orang	100%
		Proporsi PTK bersertifikat	45	orang	100%
		Proporsi PTK penggerak	3	Persentase	100%
		<b>Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)</b>			
2	PENDIDIKAN DASAR	Kemampuan literasi	59,49	Nilai	100%
		Kemampuan numerasi	41,65	Nilai	100%
		Perbedaan skor literasi	4,00	Nilai	100%
		Perbedaan skor numerasi	2,00	Nilai	100%
		Indeks iklim keamanan	89,21	Nilai	100%
		Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	89,09	Nilai	100%
		Kecukupan formasi guru ASN	73,96	Persentase	100%
		Indeks distribusi guru	0,4	Persentase	100%
		Proporsi PTK bersertifikat	53,3	Persentase	100%
		Proporsi PTK penggerak	1,88	Persentase	100%
		Pengalaman pelatihan guru	2,45	Persentase	100%
<b>Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)</b>					
		Kemampuan literasi	74,06	Nilai	100%
		Kemampuan numerasi	59,88	Nilai	100%
		Perbedaan skor literasi	4,00	Nilai	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN
			JUMLAH	SATUAN	
		4 Perbedaan skor numerasi	2,00	Nilai	100%
		5 Indeks iklim keamanan	87,86	Nilai	100%
		6 Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	88,97	Nilai	100%
		7 Kecukupan formasi guru ASN	71,93	Persentase	100%
		8 Indeks distribusi guru	0,34	Persentase	100%
		9 Proporsi PTK bersertifikat	53,96	Persentase	100%
		10 Proporsi PTK penggerak	3,37	Persentase	100%
		11 Pengalaman pelatihan guru	4,6	Persentase	100%
		<b>Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</b>			
3	PENDIDIKAN KESETARAAN	1 Kemampuan literasi	47,23	Nilai	100%
		2 Kemampuan numerasi	23,13	Nilai	100%
		3 Perbedaan skor literasi	7,11	Nilai	100%
		4 Perbedaan skor numerasi	3,56	Nilai	100%
		5 Indeks iklim keamanan	58,37	Nilai	100%
		6 Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	52,05	Nilai	100%
B.	<b>BIDANG URUSAN KESEHATAN</b>				
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2840	Orang	100%
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2711	Orang	100%
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	2581	Orang	100%
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Jumlah balita yang mendapatkan Layanan kesehatan	11453	Orang	100%
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	20540	Orang	100%
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	75556	Orang	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN
			JUMLAH	SATUAN	
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	11452	Orang	100%
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	16233	Orang	100%
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	2817	Orang	100% / o
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT (ODGJ)	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang terayani kesehatan	203	Orang	100%
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Jumlah warga negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	6232	Orang	100%
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	5549	Orang	100%
<b>C.</b>	<b>BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>				
<b>Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>					
<b>1</b>	<b>PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOKAIR MINUM SEHARI-HARI</b>	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	96	SR	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN	
			JUMLAH	SATUAN		
		2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	6696	SR	100%
		<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>				
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	2	Unit	100%
		2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	22	Pengelola	100%
D.	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	<b>Jumlah warga negara korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni</b>				
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	unit	100%
		2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	4	unit	100%
		3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	4	unit	100%
		4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	unit	100%
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<b>Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni</b>				

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN
			JUMLAH	SATUAN	
		1	0	unit	100%
		2	0	unit	100%
		3	0	unit	100%
<b>E. BIDANG URUSAN</b>					
<b>SUB URUSAN TRANTIBUM</b>					
1	<b>PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTYBAN UMUM</b>	1	24	unit	100%
		2	10	SOP	100%
		3	80	Orang	100%
		4	1	Laporan	100%



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN
			JUMLAH	SATUAN	
		5 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	2	Orang	100%
		6 Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/ atau berat)	2	orang	100%
		<b>Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana</b>			
1	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	1 Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/ legal)	1	Dokumen	100%
		2 Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	171,73	Orang	100%
		3 Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	171,73	Orang	100%
		4 Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	10	Unit	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN
			JUMLAH	SATUAN	
2	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>			
		1	86	Unit	100%
		2	10	Orang	100%
3	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>			
		1	7,335	Orang	100%
		2	10	Orang	100%
		3	1	Dokumen	100%
	SUB URUSAN KEBAKARAN	<b>Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran</b>			
1	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi ( <i>Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar</i> )	195	Layanan	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN	
			JUMLAH	SATUAN		
		2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	1	Dokumen	100%
		3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm, petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	7	Unit	100%
		4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	46	Orang	100%
		5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1	Layanan	100%
		6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	195	Layanan	100%
<b>F.</b>	<b>BIDANG URUSAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah warga negara penyandang disabilitas</b>		80	Orang	100%
	<b>SUB URUSAN SOSIAL</b>	1	Layanan data dan pengaduan	80	orang	100%
		2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi	80	orang	100%
		3	Penyediaan permakanan	80	orang	100%
		4	Penyediaan sandang	80	orang	100%
		5	Penyediaan alat bantu	80	orang	100%
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	80	orang	100%
<b>1</b>	<b>REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL</b>	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan	80	orang	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN	
			JUMLAH	SATUAN		
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	80	orang	100%
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	80	orang	100%
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	80	orang	100%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	80	orang	100%
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	80	orang	100%
		13	Layanan rujukan	80	orang	100%
			<b>Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti</b>	55	orang	100%
		1	Layanan data dan pengaduan	55	orang	100%
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi	55	orang	100%
		3	Penyediaan permakanan	55	orang	100%
		4	Penyediaan sandang	55	orang	100%
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	55	orang	100%
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	55	orang	100%
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	55	orang	100%
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti	55	orang	100%
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	55	orang	100%
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	55	orang	100%
2	<b>REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI</b>					

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN		
			JUMLAH	SATUAN			
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL	1.1	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	55	orang	100%	
		1.2	Layanan rujukan	55	orang	100%	
		<b>Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti</b>					
		1	Layanan data dan pengaduan	8285	orang	100%	
		2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi	8285	orang	100%	
		3	Penyediaan permakanaan	8285	orang	100%	
		4	Penyediaan sandang	8285	orang	100%	
		5	Penyediaan alat bantu	8285	orang	100%	
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	8285	orang	100%	
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	8285	orang	100%	
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	8285	orang	100%	
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	8285	orang	100%	
		10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	8285	orang	100%	
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	1.1	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	8285	orang	100%	
		1.2	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	8285	orang	100%	
		1.3	Layanan rujukan	8285	orang	100%	
		<b>Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>					
		1	Layanan data dan pengaduan	13	orang	100%	
		2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi	13	orang	100%	
		3	Penyediaan permakanaan	13	orang	100%	
		4	Penyediaan sandang	13	orang	100%	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SASARAN		TARGET CAPAIAN		
			JUMLAH	SATUAN			
5	PERLINDUNGAN DAN JKAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASCA BENCANA KABUPATEN	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	13	orang	100%	
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	13	orang	100%	
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	13	orang	100%	
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti	13	orang	100%	
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	13	orang	100%	
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	13	orang	100%	
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	13	orang	100%	
		12	Layanan rujukan	13	orang	100%	
		<b>Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten</b>			10	kecamatan	100%
		1	Penyediaan permakanan	10	kecamatan	100%	
		2	Penyediaan sandang	10	kecamatan	100%	
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	10	kecamatan	100%	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	10	kecamatan	100%			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	10	kecamatan	100%			

BUPATI BINTAN



ROBY KUKRNIAWAN